



EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Diva Paramita, Eenrico Bagus Rahmadante, Fajar Panjalu, Diah Apriliani, Anggara Setya Saputra

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu, Politik Universitas Wijayakusuma

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

Email:

paramitadiva86@gmail.com, fpanjalu5@gmail.com, dyahdyahapriliani@gmail.com, enricobagusrahmadante@gmail.com, anggara@unwiku.ac.id

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Pemerintah membuat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memungkinkan perempuan yang hidup dalam kemiskinan untuk berpartisipasi dan menikmati pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki implementasi hukum serta faktor-faktor yang cenderung berdampak pada pelaksanaan hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui pekerjaan rumah tangga (PKH). Artikel ini membahas bagaimana PKH dapat membantu mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah, yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. PKH telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bantuan tunai yang disertai dengan tanggung jawab untuk melakukan tugas yang telah ditentukan. Dalam artikel ini, kami menyajikan temuan penelitian tentang peran PKH, efektivitas, faktor pelaksanaan, dan dampak

PKH di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui PKH di Dinsospermades Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh kualitas perencanaan, sosialisasi, dan pendidikan PKH, pendampingan yang baik, peningkatan kemampuan keluarga, dan evaluasi yang baik.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Bantuan Tunai

ABSTRACT

The government has implemented the Family Hope Program (PKH) policy to enable women living in poverty to participate in and benefit from development. The purpose of this study is to investigate the legal implementation and factors that tend to impact the enforcement of the policy empowering poor women through domestic work (PKH). This article discusses how PKH can help reduce poverty in Central Java, which has a high poverty rate. PKH has improved the quality of life of poor communities through cash assistance accompanied by responsibilities to perform specified tasks. In this article, we present research findings on the role of PKH, its effectiveness, implementation factors, and the impact of PKH in Central Java. The results show that the policy of empowering poor women through PKH in the Social and Village Empowerment Office (Dinsospermades) of Banyumas Regency has been well implemented, as indicated by the quality of planning, socialization, and PKH education, good assistance, increased family capacity, and good evaluation.

Keywords : Evaluation, Family Hope Program, Cash Assistance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga menyangkut kesulitan masyarakat dalam mengakses

pendidikan, pelayanan kesehatan, serta layanan sosial lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat dan memberantas kemiskinan sebagai bagian dari upaya melindungi segenap bangsa (Hendri & Isnaini, 2014). Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan skema bantuan sosial bersyarat berupa bantuan tunai bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin (Dunn, 2003). Tujuan utama PKH adalah membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat sekaligus mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga pada akhirnya dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Meskipun telah dilaksanakan sejak tahun 2013, pelaksanaan PKH di berbagai daerah masih memerlukan evaluasi secara berkelanjutan. Di Desa Sanggalangit, misalnya, implementasi program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Ramaiyati, 2023). Di samping itu, permasalahan seperti ketidakakuratan data penerima dan keterlambatan penyaluran bantuan menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas PKH dalam menurunkan angka kemiskinan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program yang menyebabkan ketidaklaksanaan program sesuai pedoman dan pemotongan serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Kendala dalam pelaksanaan program antara lain kurangnya koordinasi antar tugas pelaksana dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Faktor pendukung adalah rutinnnya petugas PKH dalam membagikan bantuan (Tandigoa, 2016).

Evaluasi kebijakan memiliki peran strategis karena dapat mengungkap berbagai kelebihan dan kelemahan pelaksanaan program, sekaligus menjadi dasar perbaikan bagi kebijakan selanjutnya (Dunn, 2003). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pengambilan kebijakan di bidang pembangunan sosial. Dengan adanya kajian yang mendalam, diharapkan PKH tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu menjadi instrumen kebijakan sosial yang lebih adaptif, efektif, dan tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan fiskal, kurangnya intensitas sosialisasi, serta distribusi bantuan yang belum merata menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dan lembaga terkait. Melalui sinergi yang lebih baik, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Arikunto (2013:36) memberi tahu kita bahwa evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi tentang kinerja sesuatu yang digunakan untuk membuat keputusan tentang pilihan terbaik. Fungsi utama evaluasi adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan. Beni Setiawan menyatakan bahwa empat indikator terdiri dari evaluasi program: indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, dan indikator dampak. Namun, menurut William N Duun (Anggara, 2016), ada enam faktor yang memengaruhi penilaian: efisiensi, kecukupan, efektivitas, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

B. Model Evaluasi

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang diperkenalkan oleh Stufflebeam (2002). Model ini memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap program dengan mempertimbangkan.

- a. Evaluasi Konteks: Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang menjadi basis pelaksanaan program.
- b. Evaluasi Input: Mengevaluasi sumber daya dan strategi yang digunakan.
- c. Evaluasi Proses: Memantau bagaimana program dijalankan dan tantangan yang timbul.
- d. Evaluasi Produk: Menilai hasil akhir program dan dampaknya terhadap masyarakat.

Metodologi Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, melibatkan Kepala Desa, pendamping PKH, dan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data dianalisis secara iteratif menggunakan teknik analisis yang diajukan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan dengan penarikan secara purposive dengan berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul di analisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data menggunakan perpanjangan pengamatan Sugiyono (2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Banyumas Efektivitas

Efektivitas kebijakan bergantung pada pencapaian tujuan. Jika tujuan kebijakan tercapai, kebijakan dianggap efektif. Tetapi jika tujuan tidak tercapai, maka ada masalah dengan pelaksanaannya. Mengurangi kemiskinan adalah tujuan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, seperti yang terlihat dari wawancara dan observasi yang dilakukan, tujuan ini belum tercapai dengan baik. Beberapa masyarakat masih kurang mengetahui dan memahami tujuan PKH, dan beberapa keluarga penerima manfaat menggunakan bantuan secara salah, seperti melanggar prosedur PKH dan memberi uang kepada orang tua yang bukan anggota keluarga penerima manfaat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan PKH adalah untuk mengurangi dan menekan angka kemiskinan, memungkinkan KPM untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah, dan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat dapat sekolah hingga tingkat SMA.

Efisiensi

Peneliti mendefinisikan efisiensi pelaksanaan PKH dalam hal keterjangkauan dan penggunaan sumber daya yang optimal. Informasi yang berkaitan dengan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Hasil wawancara dengan Penerima Keluarga Manfaat (PKM) menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa untuk mencapai Program Keluarga Harapan (PKH) yang memuaskan masyarakat telah dilakukan dengan baik. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa telah dilakukan dengan baik. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa, karena kurangnya pemahaman dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemanfaatan dana belum optimal untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa. Meningkatkan pemanfaatan dana untuk keluarga miskin juga perlu mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kecukupan

Kebijakan dikatakan memenuhi kriteria kecukupan jika output yang dihasilkan dapat efektif mengatasi masalah sebelum penerapan kebijakan, kebijakan dianggap memenuhi kriteria kecukupan. Kecukupan adalah seberapa jauh Anda telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah (Dunn, 2003). Keluarga penerima manfaat mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan masih kekurangan dana untuk memenuhi semua kebutuhan akademik anak-anak mereka. Berbagai biaya pendidikan untuk KPM yang bersekolah di institusi pendidikan swasta masih belum dipenuhi oleh dana bantuan PKH. Biaya tersebut mencakup biaya ujian semester, biaya daftar ulang, dan biaya SPP. Hasil yang dicapai dari setiap kegiatan atau perencanaan disebut output. Karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam masyarakat, output dari program Keluarga Harapan tidak memadai. Banyak masyarakat yang malas bekerja karena bergantung pada bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan jenis bantuan sosial lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang program tersebut. Meskipun demikian, keluarga penerima manfaat lebih menyadari nilai bantuan yang mereka terima. dari Program Keluarga Harapan menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk mengalokasikan dana bantuan dengan cara yang bijak dan efektif. Keluarga penerima manfaat mengetahui hal ini dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan yang memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

Pemerataan

Untuk memastikan bahwa biaya dan keuntungan program didistribusikan secara merata ke semua kelompok penerima, istilah "perataan" digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terlalu diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil, keuntungan program telah didistribusikan dengan adil (Dunn, 2003). Kebijakan pemerataan publik dapat dilihat dari kesetaraan fasilitas bagi warga, apakah sudah merata atau tetap tidak merata, dan siapa yang mendapatkan fasilitas tersebut. Sangat penting bahwa program Keluarga Harapan didistribusikan dengan tepat dan sesuai untuk memastikan bahwa bantuan diberikan sesuai sasaran, seperti dana yang diperlukan oleh desa. Namun, hasil menunjukkan bahwa distribusi program ini masih belum baik di desa, karena banyak keluarga miskin tidak mendapatkan bantuan PKH dengan tepat karena data lama yang masih digunakan. Untuk memastikan bahwa program itu efektif, jangkauannya dan sasarannya juga harus dipertimbangkan. Namun, hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa jangkauan dan sasaran program PKH tidak tepat karena penerimanya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ketidakesesuaian ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti pindah dari desa, mendapatkan bantuan tanpa mengikuti prosedur, dan mendapatkan bantuan dari keluarga yang tidak memenuhi kriteria PKH.

Responsivitas

Respon masyarakat terhadap kegiatan atau kebijakan disebut responsivitas kebijakan publik. Penilaian masyarakat setempat terhadap program Keluarga Harapan yang memberikan manfaat dan hasil yang baik dikenal sebagai kepuasan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dengan program ini sudah baik karena telah membantu mereka. Observasi juga menemukan bahwa program bantuan pemerintah desa membantu masyarakat. Tujuan pembuatan program ini adalah untuk menyediakan perlindungan sosial dan fasilitas pelayanan yang mudah diakses. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pengembangan program ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ketetapan

Ketetapan dalam konteks program kebijakan menandakan bahwa tujuan yang diinginkan dari program tersebut benar-benar memberikan manfaat yang berguna dan bernilai (Dunn,



2003). Pilihan alternatif rekomendasi didasarkan pada ketepatan yang menilai apakah hasil alternatif tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Bantuan Pemerintah Desa dievaluasi berdasarkan manfaat yang diperoleh komunitas lokal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari program pemerintah desa, termasuk bantuan PKH, yang membuat KPM cukup puas. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa hasil yang dirasakan masyarakat di desa sangat positif dan sangat bermanfaat bagi KPM.

KESIMPULAN

Dari evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih ada peluang perbaikan. Untuk mengoptimalkan efektivitas program, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga terkait, transparansi dalam data penerima, serta penguatan kapasitas masyarakat supaya mereka dapat mengelola bantuan dengan lebih baik. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan PKH bisa mencapai tujuan utama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut (Soekanto, 2019) mengatakan bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan juga fisiknya dalam kelompok tersebut. PKH berusaha memutus rantai kemiskinan antar generasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. PKH telah efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Program ini berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, dan mengurangi beban biaya hidup. Keberhasilan implementasi PKH di Jawa Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komitmen pemerintah daerah, infrastruktur yang memadai, peran petugas lapangan PKH, keterlibatan masyarakat setempat, kebijakan yang mendukung, dan pertimbangan budaya lokal. Program ini meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka, serta memberikan kontribusi lebih luas terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Anggara, P. (2016). *Evaluasi kebijakan publik* William N. Dunn. (Referensi sekunder untuk Dunn).
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An integrated approach*. Pearson.
- Hendri, & Isnaini. (2014). (Kon teks UUD 1945 dan kemiskinan).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative data analysis*. (Teknik analisis data).
- Ramaiyati. (2023). (Implementasi PKH di Desa Sanggalangit).
- Soekanto, S. (2019). *Kemiskinan dan kebijakan sosial*.
- Stufflebeam, D. L. (2002). *Model evaluasi CIPP*.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tandigoa. (2016). (Kendala pelaksanaan PKH).